

EVALUASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PASAR IKAN TANJUNG BERLIAN KECAMATAN KUNDUR UTARA KABUPATEN KARIMUN

Elvi Darniati¹, Edy Akhyary², Edison³
elvidarniati16@gmail.com

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Maritim Raja Ali Haji

Abstract

Traditional Market is a favorite place for people, especially the lower and middle class to meet their daily needs. Traditional markets tend to sell local goods and less imported goods are found, because goods sold in traditional markets tend to be the same as modern markets, so the goods sold are of relatively similar quality to modern markets. This study aims to evaluate the development policy of the Tanjung Berlian fish market in North Kundur District, Karimun Regency based on 6 policy dimensions, namely: effectiveness, efficiency, adequacy, fairness, responsiveness and accuracy. The method used in this study is a qualitative research method with as many as 10 people informants consisting of 1 person from the Department of Trade, UKM and ESDM Cooperatives, 1 person from Kundur Utara District, 4 people representing the type of Traders and 4 people. The results of this study in terms of effectiveness, the achievement of the objectives of the construction of the fish market in growing the economy of the fish market traders has not been achieved. In terms of efficiency, inefficiency can be seen at the implementation stage of the Fish market policy. In terms of adequacy, the construction of a more modern, cleaner fish market that has complete facilities is correct. In terms of justice, it has not shown the application of justice in determining the location of Fish market development, for example the communication and desires between the government and traders in determining the location of the Fish market. In terms of responsiveness, one of the objectives of building a fish market is to be able to accommodate traders to a place that is more feasible, comfortable and clean and can encourage the economy of traders is correct and for responsiveness from the government is indeed good. In terms of accuracy, in the government's point of view that the Fish market development policy is right but for the benefit it is not yet, but the traders of the Fish market development policy have not been able to feel the benefits and benefits because they have to bear the losses and owe to cover the losses received. Researchers concluded that the Tanjung Berlian fish market development policy carried out by the North Kundur government of Karimun Regency was not appropriate. In carrying out the construction of the Tanjung Berlian Fish Market, the government pays more attention to and oversees the implementation process.

Keyword: Evaluation, public policy, markets.

I. Pendahuluan

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP UMRAH

²Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP UMRAH

³Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP UMRAH

Pelaksanaan otonomi daerah merupakan titik fokus yang penting dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan potensi dan kekhasan daerah masing-masing. Ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan kewenangan yang menjadi hak daerah. Maju atau tidaknya suatu daerah sangat ditentukan oleh kemampuan dan kemauan dari pemerintah daerah itu sendiri. Pemerintah daerah bebas berkreasi dan berekspresi dalam rangka membangun daerahnya, tentu saja dengan tidak melanggar ketentuan hukum yaitu perundang-undangan.

Otonomi daerah dapat diartikan sebagai kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dasar hukum desentralisasi yang baru untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang kini telah digantikan dengan undang-undang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Pembangunan ekonomi suatu daerah yang dilakukan dengan tujuan menciptakan pemerataan pembangunan yang dirasakan semua masyarakat baik untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, kesempatan kerja, dan meratakan pembagian masyarakat. Untuk mencapai hakekat dari arah pembangunan ekonomi tersebut, maka pembangunan harus didasari dengan kekhasan daerah yang bersangkutan dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, pemerintahan daerah serta partisipasi masyarakat yang diperlukan dalam merancang dan membangun pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini tidak terlepas dari pentingnya pasar didalam merancang dan membangun pertumbuhan ekonomi suatu daerah, pasar merupakan salah satu dari berbagai sistem, institusi, prosedur, penunjang hubungan sosial dan infrastruktur dimana usaha menjual barang, jasa, dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang.

Menurut Suaedi (2010:14) peran pemerintah yang moderat adalah terwujudnya pemerintah yang mampu :

- a) Menjamin ketersediaan pelayanan dasar secara berkualitas dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat;
- b) Memberikan perlindungan dari ancaman, gangguan internal dan eksternal;
- c) Menjamin keadilan dalam dinamika ekonomi dan persaingan usaha;
- d) Menjamin keberlanjutan peningkatan taraf hidup masyarakat dengan memperhatikan aspek-aspek ekonomi, social, dan lingkungan hidup.

Dalam rangka pencapaian kesejahteraan masyarakat maka dibangunlah fasilitas fasilitas umum seperti pasar tradisional. Seperti yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2008 Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar dimana fungsinya adalah melayani masyarakat disekitarnya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Pasar tradisional adalah sebuah tempat yang terbuka dimana terjadi proses transaksi jual beli yang dimungkinkan proses tawar-menawar. Di pasar tradisional pengunjung tidak selalu menjadi

pembeli, namun pengunjung bisa menjadi penjual, bahkan setiap orang bisa menjual dagangannya di pasar tradisional. Pasar tradisional merupakan sektor perekonomian yang sangat penting bagi mayoritas penduduk di Indonesia. Masyarakat miskin yang bergantung kehidupannya pada pasar tradisional tidak sedikit, menjadi pedagang di pasar tradisional merupakan alternatif pekerjaan di tengah banyaknya pengangguran di Indonesia (Masitoh, 2013).

Menurut Wicaksono dkk (2011) pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual pembeli secara langsung, bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar. Pasar tradisional cenderung menjual barang-barang lokal dan kurang ditemui barang impor, karena barang yang dijual dalam pasar tradisional cenderung sama dengan pasar modern, maka barang yang dijual pun kualitasnya relatif sama dengan pasar modern. Pasar berfungsi sebagai tempat atau wadah untuk pelayanan bagi masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari berbagai segi atau bidang, diantaranya :

1. Segi ekonomi

Yaitu tempat transaksi antara produsen dan konsumen yang merupakan komoditas untuk mawadahi kebutuhan sebagai demand dan suplai.

2. Segi sosial budaya

Kontrak sosial secara langsung yang menjadi tradisi suatu masyarakat yang merupakan interaksi antara komunitas pada sektor informal dan formal.

3. Arsitektur

Menunjukkan ciri khas daerah yang menampilkan bentuk-bentuk fisik bangunan dan artefak yang dimiliki.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 37/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan. Bab VI Pembangunan Sarana Perdagangan Pasal 19 (1) Pembangunan/*Revitalisasi* Sarana Perdagangan meliputi pembangunan bangunan yang baru atau *revitalisasi* yang sudah ada. Adapun pembangunan/revitalisasi sarana perdagangan berupa Pasar Rakyat meliputi:

- (a) Berada dilokasi yang sudah ada embrio nya,
- (b) Berada dilokasi yang strategis, dan dekat pemukiman penduduk atau pusat kegiatan ekonomi masyarakat,
- (c) Memiliki akses jalan menuju pasar dan didukung sarana transportasi umum,
- (d) Berpedoman pada SNI pasar rakyat.

Tanjung berlian merupakan salah satu pulau yang terdapat di Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun Propinsi Kepulauan Riau. Di Tanjungberlian ini terdapat salah satu pasar ikan yang berlokasi di jalan Lawik Tanjungberlian. Pasar ikan Tanjungberlian, Kecamatan Kundur Utara sudah berdiri sejak tahun 2012. Pasar ini dikelola oleh pemerintah daerah. Keberadaan pasar Tanjungberlian ini terletak dipedalaman kota yang sangat jauh dari pusat pemukiman.

Pasar Tanjungberlian ini berjalan hanya beberapa bulan saja, Seiring berjalannya waktu pasar ini tidak berjalan, tidak ada pedagang dan tidak berpenghuni layaknya pasar basah lainnya. Lapak-lapak yang dibangun terlihat kosong dan terbengkalai. Bangunan pasar ini terdiri dari dua bangunan. Keseluruhannya tidak difungsikan sebagaimana mestinya. Didalam pasar ini terdapat berbagai macam kebutuhan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat seperti pedagang sayur, pedagang ikan, pedagang ayam, pedagang rempah-rempah dan pedagang kue.

Dengan kondisi seperti ini sudah semestinya pemerintah daerah harus menyediakan fasilitas yang lengkap dan memadai karena para pedagang telah memenuhi kewajibannya dengan membayar

retribusi daerah. Dalam penelitian ini peneliti ingin mengevaluasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 37/M-DAG/PER/5/17. Tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan dalam Pembangunan Pasar Ikan Tanjung Berlian Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun.

Diantara permasalahan yang ada tentang pembangunan pasar Tanjung Berlian yang sudah tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 37/M-DAG/PER/5/2017, yaitu : pertama, terkait dengan efektivitas permasalahannya adalah lokasi pasar yang tidak strategis dan jauh dari pemukiman penduduk. Kedua, terkait dengan keadilan atau perataan permasalahannya adalah banyaknya kekurangan pada pembangunan ini. Ketiga terkait dengan ketepatan permasalahannya adalah perencanaan lokasi kurang tepat karena jauh dari pemukiman penduduk serta tidak didukung sarana transportasi umum.

Dari beberapa gejala diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Evaluasi Kebijakan Pembangunan Pasar Ikan Tanjung Berlian Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun”.

II. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Kualitatif. Menurut Sugiyono (2017:8) mengatakan bahwa : “Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natutal setting*) ; disebut juga sebagai metode etnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya ; disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.” Penelitian kualitatif merupakan suatu rangkaian kegiatan atau bisa disebut dengan proses penyaringan data atau informasi yang bersifat sewajarnya dalam arti tidak melebihi-lebihkan mengenai suatu masalah yang bersangkutan dengan kondisi, aspek, atau bidang tertentu dalam kehidupan objek yang akan di teliti oleh peneliti. Metode penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana Evaluasi Kebijakan Pembangunan Pasar Ikan Tanjung Berlian Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun.

Dalam penelitian kualitatif yang dimaksud metode yang biasanya digunakan adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, dan data skunder dan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, studi kepustakaan, dan penelusuran data online. Adapun informan pada penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 3.2 Jumlah Informan

No.	Informan	Keterangan
1.	Kadis Perdagangan, Koperasi UKM dan ESDM	Instansi yang bertanggung jawab
2.	Kepala Camat Kundur Utara	Sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap teknis di lapangan
3.	Masyarakat	Sebagai pembeli di pasar Ikan
4.	Pedagang	Mewakili jenis pedagang

Sumber : data olahan, 2020

III. Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini tentang Evaluasi Kebijakan Pembangunan Pasar Ikan Tanjung Berlian Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun. Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu ada beberapa hal yang membedakan dengan penelitian terdahulu, berikut ini merupakan penyajian uraian secara utuh dan sistematis dari beberapa penelitian.

Penelitian Skripsi Ernawati (2016) dengan judul Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Pasar Tradisional Plaza Bandar Jaya, Lampung Tengah. Hasil penelitian ini adalah Kebijakan ini belumlah efektif dalam pelaksanaannya, hal ini terlihat dari poin utama dalam kebijakan yang belum terlaksana dengan baik. Kebijakan ini pula belum efisien dalam hal sumber daya manusia, di mana masih kekurangan tenaga kerja untuk mengelola pasar, namun telah efisien dalam hal waktu, hal ini terlihat dari berbagai permasalahan yang telah ditangani. Menurut pihak pengelola, kebijakan ini belum memenuhi kecukupan, namun masyarakat telah merasa tercukupi kebutuhannya dengan keberadaan plaza dan pengelolaannya. Kebijakan ini pula mendapat respon yang baik dari masyarakat atas dibangunnya plaza ini serta pengelolaannya yang dianggap sudah lebih baik dari pada pasar sebelumnya.

Penelitian Skripsi Gilang Ramadhan, dkk (2018) Evaluasi Kebijakan Pembangunan Pasar Tani Di Kabupaten Bintan (Studi Pasar Tani, Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan). Hasil Penelitian ini adalah Kebijakan pembangunan pasar Tani masih belum berjalan dengan baik jika dilihat dari ke-enam dimensi evaluasi kebijakan tersebut. Kebijakan pembangunan pasar tani dan merelokasi tidak selamanya berakhir dengan sebuah kesepakatan yang selalu menguntungkan bagi kedua belah pihak, meskipun kedua belah pihak mempunyai tujuan yang sama sama baik menurut pandangan mereka, pemerintah juga harus melibatkan pedagang dalam perencanaan kebijakan pembangunan pasar tani sebelum melakukan relokasi agar bisa diterima dengan baik.

Penelitian Skripsi Danang Kurniawan (2019) Evaluasi Kebijakan Pembangunan Pasar Mejayan Baru Kabupaten Madiun (Studi Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Usaha Mikro). Hasil penelitian ini adalah Pembangunan Pasar Mejayan Baru ada beberapa alasan, dilihat dari dua aspek, Top down dan bottom up dapat digambarkan dengan jelas, dilihat dari segi top down dikarenakan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2010 Tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Madiun dari wilayah Kota Madiun ke Kabupaten Madiun, Kecamatan Mejayan, peraturan tersebut mengharuskan memindahkan Pusat Pemerintahan ke Kabupaten Madiun, sehingga pemindahannya harus didukung dengan infrastruktur ekonomi yang sangat baik salah satunya Pasar Mejayan Baru, pendekatan bottom up lahir tuntutan masyarakat Kabupaten Madiun, Kecamatan Mejayan, mengingat pasca terbakarnya Pasar Umum Caruban di tahun 2006, pemerintah Kabupaten Madiun hanya memberikan pelayanan melalui pasar penampungan sementara.

Berdasarkan hasil kajian dari penelitian terdahulu yang membedakan penelitian yang diteliti oleh peneliti terhadap penelitian sebelumnya terdapat berbagai aspek perbedaan antara lain Permasalahan yang dibahas masih mencakup Pasar Tradisional yang membedakan penelitian yang diteliti adalah dipenelitian ini membahas Evaluasi Kebijakan Pembangunan Pasar Ikan Tanjung Berlian Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun, lokasi penelitian yang berbeda, fokus penelitian yang berbeda, teori dan konsep yang digunakan berbeda.

Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori Willian Dunn. Adapun, kriteria evaluasi menurut Willian Dunn dikutip dalam Eko Handoyo (2012:138) terbagi 6 yaitu: efektivitas (*effectiveness*), efisiensi (*efficiency*), kecukupan (*adequacy*), keadilan (*equity*), responsivitas (*responsiveness*) dan ketepatan (*appropriateness*).

Evaluasi Kebijakan Pembangunan Pasar Ikan Tanjung Berliankecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun

Pasar Tradisional adalah salah satu kebijakan pembangunan Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun yang merupakan salah satu kebutuhan Masyarakat Kecamatan Kundur Utara. Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual dan pembeli secara langsung, bangunannya terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang di buka penjual maupun suatu pengelolaan pasar. Pada pasar tradisional ini sebagian besar menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan-bahan makanan berupa ikan, buah, sayur-sayuran, telur, daging, kain, barang elektronik, jasa, dll. Selain itu juga menjual kue tradisional dan makanan nusantara lainnya.

Penulis menggunakan teori dari Willian Dunn sebagaimana yang dikembangkan teori William Dunn tentang kriteria Evaluasi Kebijakan. Adapun secara umum, istilah evaluasi dipadankan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*), dan penilaian (*assessment*). Dalam arti spesifik, evaluasi berkaitan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan (Dunn 2003:610). Peneliti akan menjelaskan secara rinci mengenai pembahasan dari hasil peneliti telah lakukan, dan mencapai tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengevaluasi kebijakan pembangunan pasar ikan Tanjung Berlian Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun. Adapun hasil pembahasan ini diperoleh melalui observasi serta wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Berikut ini penjabaran secara rinci dari hasil penelitian yang dilakukan berdasarkan wawancara mendalam dalam 10 informan, selanjutnya peneliti mengidentifikasi sejumlah pola pikir yang mencerminkan evaluasi dengan 6 dimensi penilaiannya yaitu, efektivitas, efisiensi, kecukupan, keadilan, responsivitas dan ketepatan.

Efektivitas

Menurut William N. Dunn menyatakan bahwa : "Efektivitas (*effectiveness*) berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneterinya". Jika suatu kebijakan telah dilaksanakan namun ternyata dampaknya tidak mampu memecahkan permasalahan yang ada di masyarakat, maka bisa dikatakan kebijakan tersebut tidak berhasil.

Efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana seseorang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Pemerintah kecamatan Kundur Utara membangun Pasar Ikan ini tentunya memiliki tujuan/sasaran yang ingin dicapai, secara umum tujuan/sasaran itu adalah bagaimana pasar Ikan Tanjung Berlian ini dapat mendorong perekonomian masyarakat sekitarnya. Jadi, pencapaian tujuan dari dibangunnya pasar ikan dalam menumbuhkan geliat perekonomian pedagang pasar ikan belum tercapai. Berdasarkan wawancara peneliti dengan informan baik dari pihak pemerintah maupun pedagang menyampaikan bahwasanya dibangunnya pasar ikan ini belum bisa mendorong perekonomian.

Efisiensi (*efficiency*)

Efisiensi (*efficiency*) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien. (Dunn, 2003). Diketahui, Pasar Ikan Tanjung Berlian dibangun pada Tahun 2010 dan diresmikan pada Tahun 2012, menggunakan anggaran pusat. Pembangunan pasar tersebut berkisar Milyaran rupiah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Propinsi.

Pasar ini didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Kunder Utara Kabupaten Karimun dengan menampung hasil seluruh produksi pertanian di Kunder Utara, yang pada awalnya membuka lapak dipinggiran jalan menuju pelabuhan Tanjung Berlian Kunder Utara. Pada waktu itu pemerintah setempat berinisiatif untuk memindahkan pedagang yang berjualan di pinggir jalan umum tersebut. Lokasi pinggir jalan tersebut terlihat kumuh, kotor, berdebu dan lapaknya pun hanya menggunakan tenda bahkan ada yang tidak menggunakan tenda, namun pendapatan yang didapatkan pedagang pada waktu itu menjanjikan. Pedagang senang berjualan dipinggir jalan ini, karena jalan tersebut tempat keluar masuknya khalayak ramai yang tidak jauh dari pemukiman penduduk serta pelabuhan. Kondisi lokasi berjualan pedagang pada saat berjualan dipinggiran jalan sangat ramai dikunjungi membuat pendapatan para pedagang meningkat, ketimbang pasar Ikan yang baru dibangun pemerintah, walaupun kondisinya cukup memprihatinkan.

Pada bagian ini, yang dinilai adalah terjangkaunya biaya kebijakan pembangunan pasar. Ketika pemerintah Kecamatan Kunder Utara Kabupaten Karimun merancang kebijakan pembangunan pasar ikan, pemerintah Kecamatan Kunder Utara Kabupaten Karimun diuntungkan dengan adanya dana dari APBD Propinsi miliaran rupiah. Oleh karena itu, menurut bapak Tri Harianto dari Camat Kunder Utara dan ibuk Icha dari Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan ESDM untuk membuat dan merancang kebijakan pembangunan Pasar Ikan ini pemerintah Kunder Utara Kabupaten Karimun memanfaatkan bantuan dari APBD Propinsi.

Berdasarkan pernyataan diatas dapat dilihat bahwa sesungguhnya pemerintah Kunder Utara Kabupaten Karimun sangat terbantu oleh pemerintah pusat dalam pembangunan pasar Ikan ini. Oleh karena itu dalam perancangan kebijakan pembangunan pasar Ikan ini pemerintah Kunder Utara Kabupaten Karimun dapat memenuhi efisiensi dalam anggaran.

Pasar Ikan Kunder Utara Kabupaten Karimun merupakan salah satu sarana pemasaran produksi hasil pertanian di Kunder Utara yang tertuju pada para petani Kunder Utara, sehingga para petani tersebut tidak kesulitan dalam memasarkan hasil pertaniannya. Berdasarkan pemaparan diatas, dapat dilihat ketidakefisien pada tahap pelaksanaan kebijakan pasar Ikan. Dimana pasar Ikan yang seharusnya dapat dioptimalisasi untuk pemasukan PAD Kunder Utara Kabupaten Karimun dan dapat meningkatkan perekonomian para pedagang pasar Ikan, namun pada akhirnya malah merugikan para pedagang dan membuat pedagang tidak berdagang lagi serta beralih kepencaharian yang lain.

Kecukupan (*adequacy*)

William N. Dunn (2003) berpendapat bahwa kecukupan (*adequacy*) berarti seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi

seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi pada objek kebijakan tersebut.

Kecukupan Dimensi ini dinilai berdasarkan efektivitas dan efisiensi kebijakan jika dibandingkan dengan alternatif kebijakan lainnya. Jika dilihat dari sisi Pemerintah Kabupaten Karimun, terdapat berbagai kebijakan yang bertujuan untuk mengatasi masalah pedagang pasar Ikan di Tanjung Berlian Kabupaten Karimun selain membangun Pasar Ikan, yaitu kebijakan membangun pelabuhan yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat yang diseberang pulau menjangkau pasar. Disamping itu, nanti akan di bangun jalan bundaran yang berfungsi sebagai akses keluar masuknya kendaraan (*one way*), yang diberi nama jalan pesisir.

Jadi berdasarkan pemaparan di atas antara Instansi pemerintah, para pedagang serta masyarakat Kecamatan Kundur Utara, dibangunnya pasar Ikan yang lebih modern, bersih dan memiliki fasilitas yang lengkap sudah benar.

Keadilan (*equity*)

Perataan yang bisa diartikan dengan keadilan yang diperoleh sasaran kebijakan publik sebagai objek kebijakan terhadap pelaksana kebijakan tersebut. Kriteria perataan (*equity*) erat hubungannya dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat (Dunn, 2003). Pelaksanaan kebijakan haruslah bersifat adil dalam arti semua sektor dan dari segi lapisan masyarakat harus sama-sama dapat menikmati hasil kebijakan. Karena pelayanan publik merupakan pelayanan dari birokrasi untuk masyarakat dalam memenuhi kegiatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Pelayanan publik sendiri menghasilkan jasa publik.

Pembangunan pasar Ikan yang terletak di jalan lawik Tanjung Berlian Kecamatan Kundur Utara dibangun dengan menggunakan dana APBD Propinsi. Dalam hasil wawancara peneliti bersama Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan ESDM Kabupaten Karimun, Camat Kundur Utara dan perwakilan pedagang pasar Ikan bahwa akan dibangun pasar Ikan.

Pembangunan Pasar Ikan sudah berdiri baru diadakan musyawarah kepada pedagang dipinggir jalan bahwa akan dipindahkan kepasar Ikan yang sudah dibangun, namun tidak semua pedagang menyetujui. Berdasarkan pemaparan diatas belum menunjukkan penerapan keadilan dalam penentuan lokasi pembangunan pasar Ikan, adanya mis komunikasi dan keinginan antara pemerintah dan pedagang dalam menentukan lokasi pasar Ikan.

Responsivitas (*responsiveness*)

Responsivitas dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan. Menurut William N. Dunn, responsivitas (*responsiveness*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu (Dunn, 1999). Kriteria responsivitas cerminan nyata kebutuhan, preferensi, dan nilai dari kelompok-kelompok tertentu terhadap kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, dan kesamaan. Keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat yang menanggapi pelaksanaan setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika kebijakan akan dilaksanakan, juga tanggapan masyarakat setelah dampak kebijaksanaan sudah mulai bisa dirasakan dalam bentuk dukungan.

Pada dimensi ini yang dinilai adalah apakah kebijakan yang diambil sudah sesuai dengan masalah publik yaitu apakah selama ini pemerintah mau mendengarkan kritikan serta saran dari masyarakat serta pedagang terkait pembangunan pasar. Tujuan awal pembuatan kebijakan Pasar Ikan adalah untuk meningkatkan perekonomian serta memfasilitasi para pedagang untuk mendapat tempat berjualan yang lebih nyaman, lebih baik dan untuk penataan para pedagang pasar Ikan. Karena kalau tetap di pinggir jalan secara estetika pasar yang hanya menggunakan tenda yang sudah tidak bagus lagi itu merusak tata keindahan disana yang menjadi tempat keluar masuknya khalayak ramai. Kemudian secara kesehatan buah-buahan serta sayur-sayuran yang dijual juga tidak bersih karena terkena debu dan sebagainya.

Hal ini dapat dilihat dari pemaparan di atas yang disampaikan dari Instansi pemerintah, para pedagang serta masyarakat bahwa salah satu tujuan dibangunnya pasar Ikan adalah dapat memwadhahi para pedagang ketempat yang lebih layak, nyaman dan bersih serta dapat mendorong perekonomian para pedagang sudah benar dan untuk responsivitas dari pihak pemerintah memang baik.

Ketepatan (*Appropriateness*)

Dunn, (2003) mengatakan Kriteria evaluasi yang terakhir adalah ketepatan suatu kebijakan terhadap pemecahan masalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. William N. Dunn menyatakan bahwa kelayakan (*Appropriateness*) adalah: “Kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substantif, karena kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrumen untuk merealisasikan tujuan tersebut”. Evaluasi kebijakan merupakan proses yang dilakukan untuk mengukur sejauhmana suatu kebijakan dapat mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengukuran ini didasarkan pada tercapainya indikator-indikator pelaksanaan kebijakan, yang dapat diukur dari sisi efektivitas, efisiensi maupun *outcome* kebijakan.

Dimensi ini digunakan untuk menilai/mengevaluasi implementasi dari kebijakan Pembangunan pasar Ikan ini. Apakah hasil kebijakan pembangunan pasar Ikan ini memberikan keuntungan serta manfaat bagi seluruh masyarakat. Indikatornya disini antara lain adalah ketepatan target/sasaran kebijakan, ketepatan tujuan kebijakan, serta adanya manfaat yang diterima oleh setiap pihak yang terlibat dalam kebijakan tersebut.

Kebijakan pembangunan pasar Ikan ini yang terlibat dan yang berkepentingan dalam hal ini adalah Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan ESDM, kecamatan Kundur Utara dan pedagang pasar Ikan. Semua informan dari pemerintahan Kabupaten Karimun dalam hal ini yaitu Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan ESDM, kecamatan Kundur Utara dan pedagang pasar Ikan yang telah diwawancarai peneliti mengatakan bahwa target/sasaran dari tujuan kebijakan pembangunan pasar Ikan ini berbeda-beda.

Berbicara dari awal perencanaan lokasi Pasar saat ini kurang tepat, karena jauh dari pemukiman penduduk serta tidak adanya akses keluar masuknya kendaraan umum. Melihat dari pemaparan di atas bahwa ada perbedaan pendapat terkait sudah memberikan kebutuhan serta manfaat dan ketepatan kebijakan pembangunan pasar Ikan ini. Dalam sudut pandang pemerintah bahwa kebijakan pembangunan pasar Ikan tersebut sudah tepat namun untuk kemanfaatan memang belum, karena ada beberapa evaluasi-evaluasi yang harus dilakukan. Karena melihat pasar Ikan ini dalam jangka panjang jangan melihat dalam jangka pendek. Namun dari pedagang kebijakan pembangunan pasar Ikan belum dapat merasakan keuntungan serta kemanfaatan karena mereka harus menanggung kerugian dan berhutang untuk menutupi kerugian yang diterima.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti menyimpulkan bahwa kebijakan pembangunan pasar ikan Tanjung Berlian yang dilakukan oleh pemerintah Kundur Utara Kabupaten Karimun belum tepat. Hal ini dapat dilihat dari berpindahnya para pedagang dari tempat asal ke lokasi pasar yang dibangun tidak selamanya berakhir dengan kesepakatan yang dapat menguntungkan bagi kedua belah pihak. Meskipun kedua belah pihak mempunyai tujuan yang sama-sama baik. Dapat dilihat berdasarkan indikator yang digunakan dalam penelitian peneliti sebagai berikut:

Dari segi efektivitas, pencapaian tujuan dari dibangunnya pasar ikan dalam menumbuhkan geliat perekonomian pedagang pasar ikan belum tercapai. Dari segi efisiensi, dapat dilihat ketidakefisien pada tahap pelaksanaan kebijakan pasar Ikan. Dimana pasar Ikan yang seharusnya dapat dioptimalisasi untuk pemasukan PAD Kundur Utara Kabupaten Karimun dan dapat meningkatkan perekonomian para pedagang pasar Ikan, namun pada akhirnya malah merugikan para pedagang dan membuat pedagang tidak berdagang lagi serta beralih kepencaharian yang lain. Dari segi kecukupan, dibangunnya pasar Ikan yang lebih modern, bersih dan memiliki fasilitas yang lengkap sudah benar. Dari segi keadilan, belum menunjukkan penerapan keadilan dalam penentuan lokasi pembangunan pasar Ikan, adanya mis komunikasi dan keinginan antara pemerintah dan pedagang dalam menentukan lokasi pasar Ikan. Dari segi responsivitas, salah satu tujuan dibangunnya pasar Ikan adalah dapat mewadahi para pedagang ketempat yang lebih layak, nyaman dan bersih serta dapat mendorong perekonomian para pedagang sudah benar dan untuk responsivitas dari pihak pemerintah memang baik. Dari segi ketepatan, Dalam sudut pandang pemerintah bahwa kebijakan pembangunan pasar Ikan tersebut sudah tepat namun untuk kemanfaatan memang belum, karena ada beberapa evaluasi-evaluasi yang harus dilakukan. Karena melihat pasar Ikan ini dalam jangka panjang jangan melihat dalam jangka pendek. Namun dari pedagang kebijakan pembangunan pasar Ikan belum dapat merasakan keuntungan serta kemanfaatan karena mereka harus menanggung kerugian dan berhutang untuk menutupi kerugian yang diterima.

V. Daftar Pustaka

Buku

- Bratakusmah, S.Deddy, Solihin. (2001). *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Dunn William N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta : Gajah Mada Universitas Tekan.
- Handoyo Eko. (2012). *Kebijakan Publik*. Semarang : Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.
- Nugroho D, Riant. (2003). *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta : PT. Gramedia.
- Rusli,Budiman. (2013). *Kebijakan Publik Membangun Pelayanan Publik yang Responsif*. Bandung: Hakim Publishing.
- Setyawan, Dody. 2017. *Pengantar Kebijakan Publik*. Malang : CV.Cita Intrans Selaras.
- Subarsono. (2006). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2017. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&R*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sogono Dendy, DKK. (2012). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Winarno, Budi. (2002). *Kebijakan Publik, Teori dan Proses*. Yogyakarta : Media Presindo.

Jurnal

- D. Turnip, S. Adhi, And P. Harsasto, 2016, "Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Rangka Penataan Pasar Tradisional Dan Pasar Modern Di Kabupaten Jepara," *Journal Of Politic And Government Studies*, Vol. 5, No. 02, Pp. 171-180.
- Ifaundra. M, 2016, "Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun Tentang Relokasi Pasar (Studi Kasus Relokasi Pasar Puakang Ke Pasar Puan Maimun Tahun 2012-2013)", *JOM FISIP* Vol. 3 No. 2, Pp. 3-10.

Skripsi

- Maizarah. 2015. "*Evaluasi Kebijakan Program Raskin (Studi di Kelurahan Tanjung Pinang Barat Kota Tanjung Pinang Tahun 2014)*". Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Maritim Raja Ali Haji. Tanjungpinang.
- Ramadhan, Gilang. 2018. "*Evaluasi Kebijakan Pembangunan Pasar Tani Di Kabupaten Bintan (Studi Pasar Tani, Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan)*". Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Maritim Raja Ali Haji. Tanjungpinang.
- Herlina, Ari. 2019. "*Kebijakan Tata Kelola (Governance) Perusahaan Daerah Pada Pasar Tradisional Di Kecamatan Kundur*". Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Maritim Raja Ali Haji. Tanjungpinang.

VI. Ucapan Terimakasih

Terima kasih kepada bapak Razak dan Ibu Siti Rohani selaku orang tua dan Muhammad Mahathir selaku calon suami saya dan Susilawati, Kamsani, Kamsinawati, Norliza, Haryati, Maryati, Eva Susanti dan Evi Herawati selaku keluarga kandung saya yang selalu memberikan do'a, semangat, nasehat serta dukungan baik moril maupun materil kepada saya sehingga perkuliahan saya disini dapat berjalan dengan baik. Dan terimakasih bapak Dr. Edy Akhyary, S.Sos.,M.Si selaku Pembimbing utama yang sangat sabar membimbing, mengarahkan serta memberikan nasehat dan masukan yang sangat bermanfaat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Dan terimakasih bapak Edison, S.AP.,MPA, selaku Dosen Pembimbing pendamping yang selalu meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, bimbingan serta masukan kepada saya. Dan terimakasih bapak Agus Hendrayadi, S.Sos.,M.Si, selaku Dosen Penasehat Akademik saya dan kepada seluruh dosen Ilmu Administrasi Negara yang telah sedia memberikan ilmunya kepada saya. Terima kasih juga saya ucapkan kepada pihak yang memberikan bantuan sehingga skripsi saya ini dapat berjalan dan selesai dengan semestinya.

